

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
(RENJA)
KANTOR KECAMATAN TAKISUNG
TAHUN ANGGARAN 2025**



**KECAMATAN TAKISUNG
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2025**



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/ 824 -KUM/2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah selaras dengan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu penetapan Keputusan Bupati untuk menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2025 –

- 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 12);
22. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 39);
 23. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 34);
 24. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 69);
 25. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:
- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi renja sampai dengan triwulan I tahun berkenaan;
 - c. rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
 - d. penutup.
- KETIGA** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagai pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum

Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(Perubahan KUA dan PPAS) Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan Mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat RahmatNya jualah, maka akhirnya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Rencana Kerja) Kecamatan Takisung tahun 2025.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Rencana Kerja) Kecamatan Takisung Tahun 2025 disusun berdasarkan pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025, dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 pasal 356 ayat (1) poin (a), peraturan Kepala daerah tentang Rancangan Akhir Perubahan RKPD dijadikan dasar penetapan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja perangkat daerah.

Tersedianya data dalam Rancangan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Rencana Kerja) Kecamatan Takisung Tahun 2025 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran secara umum tentang perencanaan yang memuat program dan kegiatan Kecamatan Takisung yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Kecamatan Takisung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

Banyak kekurangan yang terdapat dalam Rancangan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Rencana Kerja) Kecamatan Takisung tahun 2025 ini, oleh karenanya kritik dan saran yang konstruktif guna perbaikan dari semua pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaan tulisan ini. Semoga Rancangan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Rencana Kerja) Kecamatan Takisung tahun 2025 ini bermanfaat bagi peningkatan kinerja khususnya aparat Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut.Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan Taufiq dan HidayahNya kepada kita semua.Amin.

Wassalamualaikum Wr.Wb



Takisung, Juni 2025

Pt. Camat Takisung

MUHAMMAD LUTHFI AKBAR, S.IP
NIP. 19860415 200701 1 001

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENCANA KERJA)
SKPD KECAMATAN TAKISUNG TAHUN 2025**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap Rancangan Akhir Perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sementara ini paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Rencana Kerja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (RAPBD), kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Perubahan Rencana Kerja (Rencana Kerja) Kecamatan Takisung tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Rencana Kerja SKPD.

Rencana Kerja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasikan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang selanjutnya bisa mengalami Rancangan Akhir Perubahan baik Rancangan Akhir Perubahan pagu anggaran ,penambahan program baru, pergeseran pagu dan yang lainnya, yang dituangkan dalam Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Takisung tahun 2025, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi dan Misi yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Tahun 2025-2029. Adapun Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025-2029 yaitu “ **BERSAMA MEMBANGUN TANAH LAUT SIMPUN, MAJU DAN BERKELANJUTAN**”.

Adapun strategi yang dilaksanakan guna pencapaian Visi dengan melaksanakan 3 Misi Tahun 2025-2029 yakni:

1. Membangun SDM yang unggul dan berdaya saing dengan nilai-nilai agama.
2. Membangun Ekonomi yang inklusif untuk penurunan kemiskinan dengan infrastruktur yang merata dan lingkungan hidup berkualitas.
3. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis.

Visi dan Misi Tahun 2025-2029 tersebut kemudian dijabarkan dalam prioritas kegiatan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut adalah :

1. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik.
3. Meningkatkan masyarakat dan kelompok masyarakat yang berdaya

4. Meningkatkan kegiatan keagamaan, sosial dan kebudayaan di masyarakat.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Rencana Kerja) Kantor Kecamatan Takisung tahun 2025 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan selanjutnya.

Kantor Kecamatan Takisung berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 40 Tahun 2010 tentang uraian tugas Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut diamanatkan bahwa Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Kecamatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja SKPD merupakan bahan acuan bagi pemerintahan daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun berikutnya. Oleh sangat strategisnya Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja SKPD maka penyusunannya harus secara sungguh-sungguh sinkron dengan perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan memperhatikan isu-isu strategis yang dapat berpengaruh dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Takisung dan Rancangan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 adalah :

1. Undang – Undang nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II tapin dan Daerah Tingkat II tabalong, dengan mengubah Undang- undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang – undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah dengan undang-undang nomor 8 Tahun 2005 dan Undang- undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rancangan Akhir Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang – undang Nonor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 - 2025;
7. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaam Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawab (LKPJ) kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada Masyarakat;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Rancangan Akhir Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Rancangan Akhir Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rancangan Akhir Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Tanah laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25)
21. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
22. Peraturan Bupati No 88 tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kecamatan.
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 pasal 356 ayat (1) poin (a), peraturan Kepala daerah tentang Rancangan Akhir Perubahan RKPD dijadikan dasar penetapan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja perangkat daerah.
24. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 24 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018-2025

25. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Rencana Kerja) Kantor Kecamatan Takisung Tahun 2025 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Kantor Kecamatan Takisung yang sudah berjalan dan yang mengalami Rancangan Akhir Perubahan untuk menjadi tolak ukur penilaian kinerja Kantor Kecamatan Takisung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

Sedangkan tujuannya adalah :

1. Sebagai acuan Kantor Kecamatan Takisung dalam mengoperasionalkan RKPD Kantor Kecamatan Takisung Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Kantor Kecamatan Takisung.
2. Merumuskan Rancangan Akhir Perubahan program dan kegiatan Kantor Kecamatan Takisung yang selama Tahun berjalan ini ada kegiatan yang harus mengalami Rancangan Akhir Perubahan yaitu Pergeseran kegiatan, Penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, Pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran.
3. Untuk mengetahui tingkat pencapaian target dan sasaran setiap program dan kegiatan.
4. Untuk mengetahui berapa anggaran/pagu yang diperlukan dalam membiayai setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selanjutnya.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2025 ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan ,prioritas dan sasaran pembangunan,rencana Program dan kegiatan Prioritas Daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
3. Keadaan Darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pergeseran Pagu kegiatan antar SKPD,Penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif,penambahan atau pengurangan Target kinerja dan pagu Kegiatan, serta Rancangan Akhir Perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
5. Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam Rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara,pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi Pedoman Penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antar perencanaan dan penganggaran, Rancangan Akhir Perubahan RKPD tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Rancangan Akhir Perubahan KUA dan Rancangan Akhir Perubahan PPAS untuk menyusun Rancangan Akhir Perubahan APBD tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Rencana Kerja) Kantor Kecamatan Takisung Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Rencana Kerja sampai dengan Triwulan I Tahun Berkenaan

BAB III Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB IV Penutup

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA

SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan triwulan I berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Takisung telah berjalan sesuai dengan acuan dan pedoman yang sudah ada. Dalam dokumen Rencana Kerja Kecamatan Takisung tahun 2025 memuat program sebanyak 5 (lima) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) Sub Kegiatan.

Berikut ini adalah hasil evaluasi pelaksanaan kinerja Keuangan Kecamatan Takisung sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Ada 6 (Enam) Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu :

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang realisasinya masih 0%
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang realisasinya masih 0%
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang realisasinya masih 11,77%
- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan yang realisasinya masih 0%
- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang realisasinya masih 0%

- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang realisasinya masih 7,67%

2. Realisasi program./kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan;

Ada 4 (empat) Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan, yaitu :

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang realisasinya telah mencapai 20,95%
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang realisasinya telah mencapai 14,23%
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang realisasinya telah mencapai 22,32%
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang realisasinya telah mencapai 24,98%

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Untuk program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan belum ada.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Adapun faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja dikarenakan diawal-awal tahun anggaran masih banyak kegiatan yang belum dilaksanakan karena menunggu dasar hukum atau aturan-aturan dan kegiatan juga harus menyesuaikan dengan Rencana Anggaran Kas (RAK) yang telah disusun sebelumnya.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD

Implikasi yang yg timbul adalah capaian serapan anggaran masih rendah dan masih jauh dari target yang telah ditetapkan.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun kebijakan yang diambil adalah dengan adanya Surat Edaran untuk percepatan serapan anggaran yang ditetapkan untuk Triwulan I sebesar 25%, Triwulan II sebesar 50% dan Triwulan III sebesar 75% dan menjatuhkan sanksi berupa pemotongan Tujangan Kinerja/Tambahan Penghasilan Pegawai bagi SKPD yang tidak memenuhi target tersebut.

LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN
Tahun Anggaran 2025
TRIWULAN I
KECAMATAN TAKISUNG

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw I		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.577.176.358,00	0,00	24,25%	867.296.416,00	32,45%		734.128.310,00	20,52%		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.567.478,00	0,00	25,00%	1.391.871,00	0,00%		0,00	0,00%		
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.944.013,00	0,00	25,00%	736.004,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.623.465,00	0,00	25,00%	655.867,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.915.541.531,00	0,00	25,00%	728.885.383,00	35,68%		610.915.091,00	20,95%		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.913.189.671,00	0,00	25,00%	728.297.418,00	35,71%	25,91%	610.915.091,00	20,97%	Tidak Ada	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.351.860,00	0,00	25,00%	587.965,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.884.049,00	0,00	25,00%	4.221.013,00	0,00%		0,00	0,00%		
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	16.884.049,00	0,00	25,00%	4.221.013,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	180.763.675,00	0,00	10,06%	18.193.242,00	8,60%		25.717.166,00	14,23%		
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.134.686,00	0,00	25,00%	2.533.673,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.051.668,00	0,00	25,00%	6.262.917,00	50,00%	0,31%	11.565.680,00	46,17%	Tidak Ada	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.828.704,00	0,00	25,00%	3.207.176,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	7.783.500,00	0,00	25,00%	1.945.875,00	1,32%	0,00%	102.500,00	1,32%	Tidak Ada	
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	14.971.860,00	0,00	25,00%	3.742.965,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	107.990.719,00	0,00	0,00%	0,00	2,70%	0,07%	14.048.986,00	13,01%	Tidak Ada	
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.002.538,00	0,00	25,00%	500.636,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	67.739.893,00	0,00	25,00%	16.934.974,00	11,12%		7.970.000,00	11,77%		
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	15.065.133,00	0,00	25,00%	3.766.284,00	50,00%	0,19%	7.970.000,00	52,90%	Tidak Ada	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.674.760,00	0,00	25,00%	13.168.690,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	303.679.732,00	0,00	25,00%	75.919.933,00	25,00%		67.795.318,00	22,32%		
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.348.000,00	0,00	25,00%	17.587.000,00	25,00%	0,44%	9.742.402,00	13,85%	Tidak Ada	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	233.331.732,00	0,00	25,00%	58.332.933,00	25,00%	1,45%	58.052.916,00	24,88%	Tidak Ada	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.000.000,00	0,00	25,00%	21.750.000,00	24,81%		21.730.735,00	24,98%		
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.500.000,00	0,00	25,00%	9.375.000,00	21,00%	0,20%	7.837.810,00	20,90%	Tidak Ada	

7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lain-lain	34.500.000,00	0,00	25,00%	8.625.000,00	18,00%	0,15%	6.772.925,00	19,63%	Tidak Ada	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00	0,00	25,00%	3.750.000,00	50,00%	0,19%	7.120.000,00	47,47%	Tidak Ada	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9.989.792,00	0,00	25,00%	2.497.448,00	0,00%		0,00	0,00%		
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	9.989.792,00	0,00	25,00%	2.497.448,00	0,00%		0,00	0,00%		
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4.979.792,00	0,00	25,00%	1.244.948,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.010.000,00	0,00	25,00%	1.252.500,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	21.080.740,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00	0,00%		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	21.080.740,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00	0,00%		
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	21.080.740,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!		0,00	0,00%		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00	0,00%		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	394.119.217,00	0,00	0,00%	0,00	10,60%		30.224.600,00	7,67%		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penguasan Kepala Daerah	394.119.217,00	0,00	0,00%	0,00	10,60%		30.224.600,00	7,67%		
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	93.417.852,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	278.637.304,00	0,00	0,00%	0,00	15,00%	1,04%	30.224.600,00	10,85%	Tidak Ada	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	22.064.061,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	

7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	12.180.894,00	0,00	0,00%	0,00	29,55%		2.700.000,00	22,17%		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12.180.894,00	0,00	0,00%	0,00	29,55%		2.700.000,00	22,17%		
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8.580.894,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3.600.000,00	0,00	0,00%	0,00	100,00%	0,09%	2.700.000,00	75,00%	Tidak Ada	
		4.014.547.001	0	#DIV/0!	869.793.864		30,05%	767.052.910	19,11%		

cc

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program Kegiatan dan Sub kegiatan dilaksanakan setiap tahun, dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun kedepan yang terbagi dua kebijakan pembangunan yaitu pembangunan jangka pendek dan menengah yang mengacu pada Rencana Strategis SKPD Kecamatan Takisung tahun 2025- 2029.

Pada tahun 2025 Kecamatan Takisung mempunyai Rencana Kerja SKPD yang terdiri dari 5 (lima) Progam, 11 (sebelas) Kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) Sub Kegiatan. sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- (A) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - (a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - (b) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- (B) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - (a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - (b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- (C) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - (a) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- (D) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - (a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - (b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- (c) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- (d) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- (e) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
- (f) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- (E) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - (a) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - (b) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- (F) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - (a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - (b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- (G) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - (a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - (b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - (c) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.

- (B) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan.
 - (a) Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Sub Kegiatan Wilayah Kecamatan.
 - (b) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.

(A) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- (a) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

(A) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

- (a) Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- (b) Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional.
- (c) Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

(A) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- (a) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- (b) Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa.

Adapun Program dan Kegiatan yang mengalami Perubahan Indikator Kinerja dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Takisung Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - ❖ Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor mengalami penambahan pagu anggaran menjadi Rp. 26.384.195,82, untuk pembelian ATK Kantor
 - ❖ Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga mengalami penambahan pagu anggaran menjadi Rp. 15.901.604,00, untuk pembelian perabot kantor yaitu karpet.
 - ❖ Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material, mengalami penambahan pagu anggaran menjadi Rp. 22.947.414,00, untuk pelaksanaan Pameran Anggrek dan Dukungan Kegiatan Porprov 2025 di Kabupaten Tanah Laut.
 - ❖ Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, mengalami penambahan pagu anggaran menjadi Rp. 182.990.718,75, untuk Perjalanan Dinas Biasa dan Perjalanan Dinas Dalam Kota.
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - ❖ Sub Kegiatan Pengadaan Mebel mengalami Penambahan pagu anggaran menjadi Rp. 43.805.040,00, untuk pembelian kursi rapat.
 - ❖ Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, mengalami Penambahan pagu anggaran menjadi Rp. 89.979.085,09, untuk pembelian sound system dan UPS.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- ❖ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, mengalami Pengurangan pagu anggaran menjadi Rp. 181.480.236,00, dikarenakan ada 2 (dua) orang PTT yang lulus menjadi PPPK.

2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - ❖ Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengalami pengurangan pagu anggaran menjadi Rp. 97.317.852,00, untuk penambahan uang harian anggota Paskibra.

3. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
 - ❖ Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa, mengalami pengurangan pagu anggaran menjadi Rp. 2.700.000,00, untuk kegiatan makan minum rapat, dikarenakan kegiatan Musrenbang Tahun 2025 dilaksanakan per Dapil yaitu di Kecamatan Panyipatan.

Dari uraian diatas untuk Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Takisung tahun 2025 mengalami Penambahan Pagu anggaran sebesar Rp. **166.934.785,17**, yaitu Rencana Kerja sebelum Rancangan Akhir Perubahan (Pagu Murni) sebesar Rp. **4.049.111.582,84** setelah Rancangan Akhir Perubahan menjadi Rp. **4.216.046.368,01**.

**PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KANTOR KECAMATAN TAKISUNG KAB. TANAH LAUT
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		KANTOR KECAMATAN TAKISUNG																			
		UNSUR KEWILAYAHAN							4.127.787.542,00	4.049.111.582,84	4.216.046.368,01	88.258.826,01								5.405.500.000,00	
	7	KECAMATAN							4.127.787.542,00	4.049.111.582,84	4.216.046.368,01	88.258.826,01								5.405.500.000,00	
	7.01	KECAMATAN							4.127.787.542,00	4.049.111.582,84	4.216.046.368,01	88.258.826,01								5.405.500.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Sekretaris Kecamatan Takisung				82 Nilai	82 Nilai	3.601.972.036,00	3.575.897.930,84	3.678.750.075,71	923.527.964,00								4.525.500.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	5.567.478,00	5.567.478,00	5.567.478,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerataan kemiskinan.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Kecamatan Takisung			7.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TAKISUNG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	2.944.013,00	2.944.013,00	2.944.013,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerataan kemiskinan.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik				3.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TAKISUNG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	2.623.465,00	2.623.465,00	2.623.465,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerataan kemiskinan.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik				4.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TAKISUNG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	2.839.115.193,00	2.839.111.323,00	2.915.541.531,00	76.426.338,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerataan kemiskinan.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Kecamatan Takisung			3.502.500.000,00	KANTOR KECAMATAN TAKISUNG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menenerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	2.836.759.463,00	2.836.759.463,00	2.913.189.671,00	76.430.208,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN ALOKASI UMUM (DAU) TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN RECAKAWI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerataan kemiskinan.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik				3.500.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TAKISUNG
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	2.355.730,00	2.351.860,00	2.351.860,00	-3.870,00	Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerataan kemiskinan.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik				2.500.000,00	KANTOR KECAMATAN TAKISUNG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	16.884.049,00	16.884.049,00	16.884.049,00	0,05			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerataan kemiskinan.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Kecamatan Takisung			15.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TAKISUNG
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				21 Paket	27 Paket	16.884.049,00	16.884.049,00	16.884.049,00	0,05	Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerataan kemiskinan.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik				15.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TAKISUNG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	270.773.304,00	255.915.455,63	268.144.656,57	-2.628.647,43			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerataan kemiskinan.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Kecamatan Takisung			356.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TAKISUNG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.134.686,00	10.134.686,00	10.134.686,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerataan kemiskinan.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik				15.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TAKISUNG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	25.052.016,00	25.051.667,63	26.384.195,82	1.332.179,82	Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerataan kemiskinan.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik				25.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TAKISUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						16	17		18	19		20	21
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	12.828.704,00	12.828.704,00	15.901.604,00	3.072.900,00	Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			15.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TAKISUNG		
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			10.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TAKISUNG		
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.783.500,00	7.783.500,00	7.783.500,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			6.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TAKISUNG		
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	3 Paket	14.971.860,00	14.971.860,00	22.947.414,00	7.975.554,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			15.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TAKISUNG		
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				366 Laporan	380 Laporan	198.000.000,00	183.142.500,00	182.990.718,75	-15.009.281,25	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			250.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TAKISUNG		
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	1 Dokumen	2.002.538,00	2.002.538,00	2.002.538,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			20.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TAKISUNG		
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Takisung				100 Persen	100 Persen	78.952.280,00	67.739.893,21	133.784.125,09	54.831.845,09					Kecamatan Takisung			165.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TAKISUNG	
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			55.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TAKISUNG		
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				11 Unit	38 Unit	25.552.192,00	15.065.133,12	43.805.040,00	18.252.848,00	Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			40.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TAKISUNG		
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	9 Unit	53.400.088,00	52.674.760,09	89.979.085,09	36.578.997,09	Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			50.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TAKISUNG		
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			20.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TAKISUNG		
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Takisung				100 Persen	100 Persen	303.679.732,00	303.679.732,00	251.828.236,00	-51.851.496,00					Kecamatan Takisung			375.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TAKISUNG	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	70.348.000,00	70.348.000,00	70.348.000,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			75.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TAKISUNG		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					Kelompok Sasaran	PRORITAS	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB					
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	Nasional	Daerah	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	233.331.732,00	233.331.732,00	181.480.236,00	-51.851.496,00	Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			300.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TAKISUNG		
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	87.000.000,00	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00					Kecamatan Takisung		105.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TAKISUNG		
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakajnya				1 Unit	1 Unit	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			40.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TAKISUNG		
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya				6 Unit	6 Unit	34.500.000,00	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			45.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TAKISUNG		
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				47 Unit	47 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			20.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TAKISUNG		
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM Kecamatan Takisung				90,10 Nilai	90,10 Nilai	9.989.792,00	9.989.792,00	9.989.792,00	10.010.206,00							20.000.000,00			
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Diaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Diaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				100 Persen	100 Persen	9.989.792,00	9.989.792,00	9.989.792,00	0,00					Masyarakat Kecamatan Takisung		20.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TAKISUNG		
	7.01.02.2.02.0002	Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Facilitasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	4.979.792,00	4.979.792,00	4.979.792,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			10.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TAKISUNG		
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	5.010.000,00	5.010.000,00	5.010.000,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			10.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TAKISUNG		
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBEDIAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IKM Kecamatan Takisung				90,10 Nilai	90,10 Nilai	44.996.077,00	22.325.077,00	21.080.740,00	45.003.923,00							90.000.000,00			
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Nilai IKM Kecamatan Takisung				100 Persen	100 Persen	44.996.077,00	22.325.077,00	21.080.740,00	-23.915.337,00					Masyarakat Kecamatan Takisung		65.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TAKISUNG		
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			10.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TAKISUNG		
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	44.996.077,00	22.325.077,00	21.080.740,00	-23.915.337,00	Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			55.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TAKISUNG		
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Nilai IKM Kecamatan Takisung				100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00					Masyarakat Kecamatan Takisung		25.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TAKISUNG		
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditelelegasikan				2 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Taksung, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			15.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TAKISUNG
	7.01.03.2.03.0005	Facilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Taksung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Taksung, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			10.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TAKISUNG
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Nilai IKM Kecamatan Taksung				90,10 Nilai	90,10 Nilai	4.993.749,00	4.153.749,00	0,00	20.006.251,00							25.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keterlaksanaan dan Keterlaksanaan Umum	Persentase Capaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keterlaksanaan dan Keterlaksanaan Umum				100 Persen	100 Persen	4.993.749,00	4.153.749,00	0,00	-4.993.749,00					Masyarakat Kecamatan Taksung		25.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TAKISUNG
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	0 Laporan	4.993.749,00	4.153.749,00	0,00	-4.993.749,00	Kab. Tanah Laut, Taksung, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			10.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TAKISUNG
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Taksung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Taksung, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			15.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TAKISUNG
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Nilai IKM Kecamatan Taksung				90,10 Nilai	90,10 Nilai	429.802.813,00	402.031.959,00	494.944.866,30	250.197.187,00							680.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Nilai IKM Kecamatan Taksung				100 Persen	100 Persen	429.802.813,00	402.031.959,00	494.944.866,30	65.142.053,30					Masyarakat Kecamatan Taksung		680.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TAKISUNG
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				22 Orang	22 Orang	100.017.852,00	95.217.852,00	97.317.852,00	-2.700.000,00	Kab. Tanah Laut, Taksung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			130.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TAKISUNG
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				900 Orang	1100 Orang	284.984.961,00	284.334.961,00	375.562.953,30	90.577.992,30	Kab. Tanah Laut, Taksung, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			500.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TAKISUNG
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				8 Dokumen	8 Dokumen	44.800.000,00	22.479.146,00	22.064.061,00	-22.735.939,00	Kab. Tanah Laut, Taksung, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			50.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TAKISUNG
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Nilai IKM Kecamatan Taksung				90,10 Nilai	90,10 Nilai	36.033.075,00	34.713.075,00	11.280.894,00	28.966.925,00							65.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Penguasaan Pemerintahan Desa	Persentase Capaian Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Penguasaan Pemerintahan Desa				100 Persen	100 Persen	36.033.075,00	34.713.075,00	11.280.894,00	-24.752.181,00					Masyarakat Kecamatan Taksung		65.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TAKISUNG
	7.01.06.2.01.0002	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	0 Dokumen	4.995.587,00	4.995.587,00	0,00	-4.995.587,00	Kab. Tanah Laut, Taksung, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			15.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TAKISUNG
	7.01.06.2.01.0003	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Penyediaan Aset Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen yang Dyasorir dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				24 Dokumen	2 Dokumen	9.973.668,00	8.653.668,00	8.580.894,00	-1.392.774,00	Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			15.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TAKISUNG
	7.01.06.2.01.0006	Facilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				2 Dokumen	0 Dokumen	9.129.228,00	9.129.228,00	0,00	-9.129.228,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			15.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TAKISUNG
	7.01.06.2.01.0009	Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				2 Dokumen	1 Dokumen	11.934.592,00	11.934.592,00	2.700.000,00	-9.234.592,00	Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			20.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TAKISUNG
			J U M L A H						4.127.787.542,00	4.049.111.582,84	4.216.046.368,01	88.258.826,01							5.405.500.000,00	

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Perubahan Rencana kerja (Rencana Kerja) Kecamatan Takisung tahun 2025 dibuat berdasarkan Pelaksanaan Rencana Kerja selama tahun berjalan dan didasari atas beberapa pertimbangan diantaranya adanya kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, adanya pergeseran anggaran kegiatan untuk keefektifan dan efisien anggaran , selain itu juga dilihat dari realisasi anggaran kegiatan sampai dengan triwulan I sehingga sisa anggaran terjadi pergeseran serta adanya selisih Pagu anggaran dari Rencana Kerja SKPD tahun 2025 dengan DPA SKPD tahun 2025.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Takisung. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf kantor Kecamatan Takisung sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Demikian Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Rencana Kerja) Kecamatan Takisung tahun 2025 dibuat sebagai Bahan kerja selanjutnya, semoga Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi dalam proses Pembangunan selanjutnya.

Takisung, Juni 2025

Plt. Camat Takisung



MUHAMMAD LUTHFI AKBAR, S.IP
NIP. 19860415 200701 1 001

**Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
Per Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan Per Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**

Kode	SKPD/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)
				APBD TA. 2025	Perubahan KUA dan PPAS	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.0.00.0.00.10.0000	KANTOR KECAMATAN TAKISUNG			4.049.111.582,84	4.216.046.368,01	166.934.785,17
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.575.897.930,84	3.678.750.075,71	102.852.144,87
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5.567.478,00	5.567.478,00	-
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	6 Dokumen	2.944.013,00	2.944.013,00	-
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
		<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	4 Laporan	2.623.465,00	2.623.465,00	-
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.839.111.323,00	2.915.541.531,00	76.430.208,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	21 Orang/bulan	2.836.759.463,00	2.913.189.671,00	76.430.208,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					
		<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	5 Dokumen	2.351.860,00	2.351.860,00	-
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			16.884.049,00	16.884.049,05	0,05
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					
		<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	27 Paket	16.884.049,00	16.884.049,05	0,05
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			255.915.455,63	268.144.656,57	12.229.200,94
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	10.134.686,00	10.134.686,00	-
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	4 Paket	25.051.667,63	26.384.195,82	1.332.528,19
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
		<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	2 Paket	12.828.704,00	15.901.604,00	3.072.900,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
		<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	0 Paket	-	-	-

Kode	SKPD/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)
				APBD TA. 2025	Perubahan KUA dan PPAS	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket	7.783.500,00	7.783.500,00	-
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material					
		<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>	3 Paket	14.971.860,00	22.947.414,00	7.975.554,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	380 Laporan	183.142.500,00	182.990.718,75	(151.781,25)
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					
		<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	1 Dokumen	2.002.538,00	2.002.538,00	-
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			67.739.893,21	133.784.125,09	66.044.231,88
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
		<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	0 Unit	-	-	-
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					
		<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	38 Unit	15.065.133,12	43.805.040,00	28.739.906,88
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	9 Unit	52.674.760,09	89.979.085,09	37.304.325,00
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
		<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	2 Unit	-	-	-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			303.679.732,00	251.828.236,00	(51.851.496,00)
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	70.348.000,00	70.348.000,00	-
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	233.331.732,00	181.480.236,00	(51.851.496,00)
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			87.000.000,00	87.000.000,00	-
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					

Kode	SKPD/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)
				APBD TA. 2025	Perubahan KUA dan PPAS	
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	1 Unit	37.500.000,00	37.500.000,00	-
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	6 Unit	34.500.000,00	34.500.000,00	-
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	47 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	-
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			9.989.792,00	9.989.792,00	-
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			9.989.792,00	9.989.792,00	-
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan					
		<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</i>	1 Laporan	4.979.792,00	4.979.792,00	-
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
		<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	1 Laporan	5.010.000,00	5.010.000,00	-
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			22.325.077,00	21.080.740,00	(1.244.337,00)
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			22.325.077,00	21.080.740,00	(1.244.337,00)
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di					
		<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	0 Lembaga Kemasyarakan	-	-	-
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
		<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	2 Laporan	22.325.077,00	21.080.740,00	(1.244.337,00)
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			-	-	-
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					
		<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>	0 Lembaga Kemasyarakan	-	-	-
7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna					

Kode	SKPD/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)
				APBD TA. 2025	Perubahan KUA dan PPAS	
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</i>	0 Laporan	-	-	-
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			4.153.749,00	-	(4.153.749,00)
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			4.153.749,00	-	(4.153.749,00)
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					
		<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	0 Laporan	4.153.749,00	-	(4.153.749,00)
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					
		<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	0 Laporan	-	-	-
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			402.031.959,00	494.944.866,30	92.912.907,30
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			402.031.959,00	494.944.866,30	92.912.907,30
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	22 Orang	95.217.852,00	97.317.852,00	2.100.000,00
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional</i>	1100 Orang	284.334.961,00	375.562.953,30	91.227.992,30
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					
		<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>	8 Dokumen	22.479.146,00	22.064.061,00	(415.085,00)
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			34.713.075,00	11.280.894,00	(23.432.181,00)

Kode	SKPD/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)
				APBD TA. 2025	Perubahan KUA dan PPAS	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			34.713.075,00	11.280.894,00	(23.432.181,00)
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					
		<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	0 Dokumen	4.995.587,00	-	(4.995.587,00)
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					
		<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	2 Dokumen	8.653.668,00	8.580.894,00	(72.774,00)
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					
		<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</i>	0 Dokumen	9.129.228,00	-	(9.129.228,00)
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					
		<i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</i>	1 Dokumen	11.934.592,00	2.700.000,00	(9.234.592,00)